



PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hukum;
- b. bahwa penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 50);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya yang diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## BAB II JABATAN DAN KELAS JABATAN

### Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jabatan manajerial; dan
  - b. Jabatan nonmanajerial.
- (3) Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Jabatan pimpinan tinggi madya;
  - b. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - c. Jabatan administrator; dan
  - d. Jabatan pengawas.
- (4) Jabatan nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Jabatan fungsional; dan
  - b. Jabatan pelaksana.
- (5) Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat Jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Hukum.

### Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrator dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan administrasi.
- (3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a didasarkan pada:
  - a. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan fungsional; atau
  - b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan fungsional.

- (4) Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan pelaksana.
- (5) Kelas Jabatan bagi Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan staf khusus Menteri.

### BAB III TUNJANGAN KINERJA

#### Pasal 5

Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Besaran dan pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1083), dinyatakan tidak berlaku bagi Pegawai kecuali ketentuan Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2025

MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
HUKUM

DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

A. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI,  
PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
SEKRETARIAT JENDERAL		
1	SEKRETARIS JENDERAL	17
2	STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	16
3	STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL	16
4	STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI	16
5	KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	15
6	KEPALA BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN TATA USAHA	13
7	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	13
8	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA	13
9	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
10	KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	15
11	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA USAHA	13
12	KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA MANUSIA	13
13	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
14	KEPALA BIRO KEUANGAN	15
15	KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA USAHA	13
16	KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	13
17	KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN	13
18	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
19	KEPALA BIRO BARANG MILIK NEGARA	15
20	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN TATA USAHA	13
21	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
22	KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA	13
23	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
24	KEPALA BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN KERJA SAMA	15
25	KEPALA BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN TATA USAHA	13
26	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA	13
27	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
28	KEPALA BIRO UMUM	15
29	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	13
30	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI	10
31	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA WAKIL MENTERI	10
32	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT JENDERAL	10
33	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI	10
34	KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN TATA USAHA	13
35	KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM	10
36	KEPALA SUBBAGIAN KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS	10
37	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
38	KEPALA BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN PENGAMANAN	13
39	KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU PIMPINAN	10
40	KEPALA SUBBAGIAN KEPROTOKOLAN	10
41	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN	10
42	KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	15
43	KEPALA BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	13
44	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
45	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17
46	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
47	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	13
48	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA	13
49	KEPALA BAGIAN UMUM	13
50	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	10
51	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
52	DIREKTUR PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
53	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI PERENCANAAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13
54	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK	13
55	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
56	DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
57	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG	13
58	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM	13
59	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
60	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I	15
61	KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI HARMONISASI	13
62	KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA HARMONISASI	13
63	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
64	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II	15
65	KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI HARMONISASI	13
66	KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA HARMONISASI	13
67	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
68	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN III	15
69	KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI HARMONISASI	13
70	KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA HARMONISASI	13
71	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
72	DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
73	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	13
74	KEPALA SUBDIREKTORAT BINA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13
75	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
76	DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, PUBLIKASI, DAN SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
77	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13
78	KEPALA SUBDIREKTORAT PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13
79	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
80	DIREKTUR LITIGASI DAN NONLITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
81	SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK, KEAMANAN DAN PEREKONOMIAN	13
82	SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL, BUDAYA, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	13
83	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM		
84	DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	17
85	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	15
86	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	13
87	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	13
88	KEPALA BAGIAN UMUM	13
89	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	10
90	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10
91	DIREKTUR PERDATA	15
92	KEPALA SUBDIREKTORAT PROFESI KEPERDATAAN	13
93	KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN HUKUM PERDATA	13
94	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
95	DIREKTUR PIDANA	15
96	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	13
97	KEPALA SUBDIREKTORAT DAKTILOSKOPI	13
98	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
99	DIREKTUR TATA NEGARA	15
100	KEPALA SUBDIREKTORAT KEWARGANEGARAAN	13
101	KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN DOKUMEN PARTAI POLITIK	13
102	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
103	DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL	15
104	KEPALA SUBDIREKTORAT OTORITAS PUSAT	13
105	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL	13
106	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
107	DIREKTUR BADAN USAHA	15
108	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
109	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	15
110	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL		
111	DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	17
112	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	15
113	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	13
114	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	13
115	KEPALA BAGIAN UMUM	13
116	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	10
117	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10
118	DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	15
119	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PELAYANAN	13
120	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
121	DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG	15
122	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PELAYANAN	13
123	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI KOMISI BANDING PATEN	13
124	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
125	DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	15
126	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PELAYANAN	13
127	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI KOMISI BANDING MEREK	13
128	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
129	DIREKTUR KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN, DAN EDUKASI	15
130	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA	13
131	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN DAN EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
132	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
133	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	15
134	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
135	DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM	15
136	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN SENGKETA ALTERNATIF	13
137	KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN	13
138	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
INSPEKTORAT JENDERAL		
139	INSPEKTUR JENDERAL	17
140	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	15
141	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	13
142	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	13
143	KEPALA BAGIAN UMUM	13
144	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	10
145	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10
146	INSPEKTUR WILAYAH I	15
147	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
148	INSPEKTUR WILAYAH II	15
149	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
150	INSPEKTUR WILAYAH III	15
151	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
152	INSPEKTUR WILAYAH IV	15
153	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
154	INSPEKTUR WILAYAH V	15
155	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL		
156	KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	17
157	SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	15
158	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	13
159	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	13
160	KEPALA BAGIAN UMUM	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
161	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	10
162	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10
163	KEPALA PUSAT PEMANTAUAN, PENINJAUAN, DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL	15
164	KEPALA BIDANG PENILAIAN MANFAAT DAN DAMPAK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL	13
165	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
166	KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM	15
167	KEPALA BIDANG BINA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM	13
168	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
169	KEPALA PUSAT LAYANAN LITERASI HUKUM DAN PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL	15
170	KEPALA BIDANG BINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL	13
171	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
172	KEPALA PUSAT PEMBUDAYAAN DAN BANTUAN HUKUM	15
173	KEPALA BIDANG ADVOKASI HUKUM	13
174	KEPALA BIDANG BINA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM	13
175	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM		
176	KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM	17
177	SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM	15
178	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	13
179	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	13
180	KEPALA BAGIAN UMUM	13
181	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10
182	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	10
183	KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	15
184	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
185	KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM	15
186	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
187	KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM	15
188	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
189	KEPALA PUSAT STRATEGI EVALUASI DAN PUBLIKASI KEBIJAKAN HUKUM	15
190	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM		
191	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM	17
192	SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM	15
193	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	13
194	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	13
195	KEPALA BAGIAN UMUM	13
196	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	10
197	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10
198	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN	15
199	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
200	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL	15
201	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
202	KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	15
203	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
KANTOR WILAYAH		
204	KEPALA KANTOR WILAYAH HUKUM	15
205	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM	14
206	KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	13
207	KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	13
208	KEPALA DIVISI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	14
209	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	13
POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA		
210	DIREKTUR POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA	15
211	WAKIL DIREKTUR I BIDANG AKADEMIK	14
212	WAKIL DIREKTUR II BIDANG KEUANGAN DAN UMUM	14
213	WAKIL DIREKTUR III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	14
214	KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
215	KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REFORMASI BIROKRASI	10
216	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	10
217	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	10
218	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJASAMA	13
219	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK	10
220	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KETARUNAAN DAN ALUMNI	10
221	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ADMINISTRASI KERJASAMA	10
BALAI HARTA PENINGGALAN		
221	KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN	13
223	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I	10
224	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH II	10
225	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH III	10
226	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	10
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM		
227	KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM	13
228	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10
229	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN	10
230	KEPALA SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI	10

B. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JENJANG KEAHLIAN	
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	8
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	10
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	12
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI UTAMA	14
2	PENYULUH HUKUM JENJANG KEAHLIAN	
	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	8
	PENYULUH HUKUM AHLI MUDA	9
	PENYULUH HUKUM AHLI MADYA	11

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	PENYULUH HUKUM AHLI UTAMA	13
3	ANALIS HUKUM JENJANG KEAHLIAN	
	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	8
	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	9
	ANALIS HUKUM AHLI MADYA	11
	ANALIS HUKUM AHLI UTAMA	13
4	PENERJEMAH JENJANG KEAHLIAN	
	PENERJEMAH AHLI PERTAMA	8
	PENERJEMAH AHLI MUDA	9
	PENERJEMAH AHLI MADYA	11
5	KURATOR KEPERDATAAN JENJANG KEAHLIAN	
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI PERTAMA	8
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI MUDA	9
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI MADYA	11
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI UTAMA	13
6	PEMERIKSA PATEN JENJANG KEAHLIAN	
	PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA	8
	PEMERIKSA PATEN AHLI MUDA	9
	PEMERIKSA PATEN AHLI MADYA	11
	PEMERIKSA PATEN AHLI UTAMA	13
7	PEMERIKSA MEREK JENJANG KEAHLIAN	
	PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA	8
	PEMERIKSA MEREK AHLI MUDA	9
	PEMERIKSA MEREK AHLI MADYA	11
	PEMERIKSA MEREK AHLI UTAMA	13
8	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI JENJANG KEAHLIAN	
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI PERTAMA	8
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI MUDA	9
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI MADYA	11
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI UTAMA	13
9	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL JENJANG KEAHLIAN	
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI PERTAMA	8
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI MUDA	9
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI MADYA	11
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI UTAMA	13
10	DOKTER/SPELIALIS JENJANG KEAHLIAN	
	DOKTER AHLI PERTAMA	9
	DOKTER AHLI MUDA	10
	DOKTER AHLI MADYA	12

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	DOKTER AHLI UTAMA	14
11	DOKTER GIGI/SPECIALIS JENJANG KEAHLIAN	
	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	9
	DOKTER GIGI AHLI MUDA	10
	DOKTER GIGI AHLI MADYA	12
	DOKTER GIGI AHLI UTAMA	14
12	TERAPIS GIGI DAN MULUT JENJANG KEAHLIAN	
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	8
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA	9
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA	11
13	TERAPIS GIGI DAN MULUT JENJANG KETERAMPILAN	
	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	6
	TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR	7
	TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA	8
14	PERAWAT JENJANG KEAHLIAN	
	PERAWAT AHLI PERTAMA	8
	PERAWAT AHLI MUDA	9
	PERAWAT AHLI MADYA	11
15	PERAWAT JENJANG KETERAMPILAN	
	PERAWAT TERAMPIL	6
	PERAWAT MAHIR	7
	PERAWAT PENYELIA	8
16	PSIKOLOG KLINIS JENJANG KEAHLIAN	
	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	8
	PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA	9
	PSIKOLOG KLINIS AHLI MADYA	11
17	APOTEKER JENJANG KEAHLIAN	
	APOTEKER AHLI PERTAMA	8
	APOTEKER AHLI MUDA	9
	APOTEKER AHLI MADYA	11
18	ASISTEN APOTEKER JENJANG KETERAMPILAN	
	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	6
	ASISTEN APOTEKER MAHIR	7
	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8
19	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN JENJANG KEAHLIAN	
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	8
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA	9



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA	11
20	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN JENJANG KETERAMPILAN	
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	6
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR	7
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8
21	FISIOTERAPIS JENJANG KEAHLIAN	
	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	8
	FISIOTERAPIS AHLI MUDA	9
	FISIOTERAPIS AHLI MADYA	11
22	FISIOTERAPIS JENJANG KETERAMPILAN	
	FISIOTERAPIS TERAMPIL	6
	FISIOTERAPIS MAHIR	7
	FISIOTERAPIS PENYELIA	8
23	PEREKAM MEDIS JENJANG KETERAMPILAN	
	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	6
	PEREKAM MEDIS MAHIR	7
	PEREKAM MEDIS PENYELIA	8
24	NUTRISIONIS JENJANG KEAHLIAN	
	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8
	NUTRISIONIS AHLI MUDA	9
	NUTRISIONIS AHLI MADYA	11
25	ADMINISTRATOR KESEHATAN JENJANG KEAHLIAN	
	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	8
	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA	9
	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA	11
26	BIDAN JENJANG KEAHLIAN	
	BIDAN AHLI PERTAMA	8
	BIDAN AHLI MUDA	9
	BIDAN AHLI MADYA	11
27	BIDAN JENJANG KETERAMPILAN	
	BIDAN TERAMPIL	6
	BIDAN MAHIR	7
	BIDAN PENYELIA	8
28	ARSIPARIS JENJANG KEAHLIAN	
	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8
	ARSIPARIS AHLI MUDA	9
	ARSIPARIS AHLI MADYA	11

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
29	ARSIPARIS JENJANG KETERAMPILAN	
	ARSIPARIS TERAMPIL	6
	ARSIPARIS MAHIR	7
	ARSIPARIS PENYELIA	8
30	PUSTAKAWAN JENJANG KEAHLIAN	
	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	8
	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	9
	PUSTAKAWAN AHLI MADYA	11
31	PUSTAKAWAN JENJANG KETERAMPILAN	
	PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL	6
	PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR	7
	PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA	8
32	WIDYAIKWARA JENJANG KEAHLIAN	
	WIDYAIKWARA AHLI PERTAMA	8
	WIDYAIKWARA AHLI MUDA	10
	WIDYAIKWARA AHLI MADYA	12
	WIDYAIKWARA AHLI UTAMA	14
33	DOSEN JENJANG KEAHLIAN	
	ASISTEN AHLI	9
	LEKTOR	11
	LEKTOR KEPALA	13
	PROFESOR	15
34	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN JENJANG KEAHLIAN	
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	8
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA	10
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA	12
35	PENATA PENERBITAN ILMIAH JENJANG KEAHLIAN	
	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI PERTAMA	8
	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MUDA	9
	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MADYA	11
36	ANALIS KEBIJAKAN JENJANG KEAHLIAN	
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	12

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
37	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR JENJANG KEAHLIAN	
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	10
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	12
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI UTAMA	14
38	ANALIS SDM APARATUR JENJANG KEAHLIAN	
	ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA	8
	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	10
	ANALIS SDM APARATUR AHLI MADYA	12
39	PRANATA SDM APARATUR JENJANG KETERAMPILAN	
	PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL	6
	PRANATA SDM APARATUR MAHIR	7
	PRANATA SDM APARATUR PENYELIA	8
40	AUDITOR JENJANG KEAHLIAN	
	AUDITOR AHLI PERTAMA	8
	AUDITOR AHLI MUDA	10
	AUDITOR AHLI MADYA	12
	AUDITOR AHLI UTAMA	14
41	AUDITOR JENJANG KETERAMPILAN	
	AUDITOR TERAMPIL	6
	AUDITOR MAHIR	7
	AUDITOR PENYELIA	9
42	PERENCANA JENJANG KEAHLIAN	
	PERENCANA AHLI PERTAMA	8
	PERENCANA AHLI MUDA	10
	PERENCANA AHLI MADYA	12
43	ANALIS ANGGARAN JENJANG KEAHLIAN	
	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	8
	ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA	10
	ANALIS ANGGARAN AHLI MADYA	12
44	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT JENJANG KEAHLIAN	
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	9
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA	11

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
45	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT JENJANG KETERAMPILAN	
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	6
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MAHIR	7
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA	8
46	ANALIS KERJA SAMA JENJANG KEAHLIAN	
	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	8
	ANALIS KERJA SAMA AHLI MUDA	10
	ANALIS KERJA SAMA AHLI MADYA	12
47	PRANATA KOMPUTER JENJANG KEAHLIAN	
	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8
	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9
	PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11
48	PRANATA KOMPUTER JENJANG KETERAMPILAN	
	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6
	PRANATA KOMPUTER MAHIR	7
	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8
49	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA JENJANG KEAHLIAN	
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	8
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	10
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA	12
50	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA JENJANG KEAHLIAN	
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI PERTAMA	8
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI MUDA	10
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI MADYA	12
51	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA JENJANG KETERAMPILAN	
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERAMPIL	7
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MAHIR	8
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PENYELIA	9

C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN LAINNYA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	STAF KHUSUS MENTERI	16

D. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	7
2	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	7
3	FASILITATOR PEMERINTAHAN	7
4	KONSELOR SDM	7
5	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7
6	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	7
7	PENGENDALI KONTEN INTERNET	7
8	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	6
9	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6
10	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	6
11	DOKUMENTALIS HUKUM	6
12	PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN	6
13	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6
14	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5
15	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5
16	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1

MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS